

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH OKNUM MENURUT
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
NOMOR 17 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

**DEFIANTI
N.I.M : 24.14.4.036**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT
PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH OKNUM MENURUT
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
NOMOR 17 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

DEFIANTI

N.I.M : 24.14.4.036



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pencurian Tenaga Listrik Oleh Oknum Menurut Fatwa Mjelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat).

Fokus studi ini adalah mengenai perlindungan konsumen terhadap pencurian tenaga listrik oleh oknum menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Penulisan ini bertujuan 1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Positif Indonesia, 2) Untuk mengetahui Praktek Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum dan Dampak Negatif yang Dirasakan oleh Konsumen di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, 3) Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Listrik di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Perlindungan hukum terhadap konsumen Menurut Fatwa Majelis Ulama Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Positif adalah Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan. 2) Praktek pencurian yang dilakukan oleh oknum yaitu: a) Mengganti Miniature Circuit (MCB), b) Dengan mengakali kWh meter (meteran listrik), c) Gabungan antara pelanggaran jenis pertama dan kedua, yaitu mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran, dan d) dengan membuat sambungan listrik dari penerangan jalan umum (PJU). 3) Perlindungan konsumen listrik telah ada di Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 akan tetapi masih belum maksimal dikarenakan masih lemahnya pengawasan PT. PLN di desa secanggang untuk meminimalisir praktek-praktek pencurian oleh oknum pencurian tenaga listrik ditambah lagi dengan lemahnya sanksi terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dan banyaknya petugas-petugas yang turut serta membantu kelangsungan pencurian listrik tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pencurian Tenaga Listrik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas al-Hamdulillahi Robbil ‘Alamin tiada henti karena telah terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada insan pilihan Tuhan, nabi besar Muhammad saw.

Dengan setulus hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini hasil upaya dan usaha yang maksimal dari penulis. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis di dalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Akan tetapi, patut disyukuri karena banyak pengalaman yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi tersusun bukan semata-mata hasil usaha sendiri, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi oleh semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, S. Ag, MA, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Ibu Tetty Mariana, SH, MKN, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Mustafa Kamal Rokan, S. HI, MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan Ibu Annisa Sativa SH, M, HUM, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya terkesan dengan dedikasi dan komitmen mereka selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang senantiasa memotivasi saya dalam studi dan membimbing menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen beserta staff pegawai Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Junaidi Akmal dan Ibunda Siti Hajar. Yang senantiasa memberikan semangat, materi dan selalu berdo'a kepada Allah swt. demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Untuk kakak dan Adikku, Febriandi Akma S. Pd, Dian Novita, M. Topan, Adelika Sasabila, Ainun Syahdilla, Khairatul Rizka yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan doanya selama ini.
9. Untuk keluarga besarku di Desa Secanggan Kecamatan Secanggan Kabupaten Langkat, yang senantiasa mendoakan kesuksesan hidupku di dunia maupun di akhirat.
10. Kepada teman-teman satu genk Mak Bigos, Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu hadir disaat susah dan senangku dan selalu memotivasiku untuk terus menjadi yang lebih baik.

11. Kepada teman-teman seperjuangan Muamala D stambuk 2014 di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih atas segala canda dan tawa dalam masa-masa perjuangan menempuh pendidikan.

12. Terkhusus, buat engkau wahai Lelaki yang selalu kukagumi Khaidir Azmi S. Pd, Semoga, di suatu malam yang indah nanti kita bisa bersama-sama membaca Skripsi ini.

Sebagai akhir kata semoga Allah swt. memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2019

Defianti
21144036

DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hipotesis	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	18
1. Pengertian Konsumen	18
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	21
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	29
C. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam	32
1. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	32
2. Hak-hak Konsumen Persepektif Islam.	40

D. Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum	43
1. Pengertian Listrik	43
2. Pengertian pencurian Tenaga Listrik.....	45
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT HUKUM	
 POSITIF DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA	49
A. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif.....	49
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang	
Perlindungan Konsumen	49
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang	
Ketenagalistrikan	50
3. Hubungan Antara Undang-Undang Perlindungan	
Konsumen dengan Undang-Undang Kelistrikan	
dalam perspektif Hak.....	57
B. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Fatwa Majelis	
Ulama Indonesia	71
1. Perlindungan Konsumen Menurut Majelis Ulama	
Indonesia	71
2. Fatwa Majelis Ulama Nomor 17 Tahun 2016	
Tentang Pencurian Tenaga Aris Listrik	78
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT	
 PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH OKNUM MENURUT	
 FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 17	
 TAHUN 2016.....	81
A. faktor-faktor dan Proses terjadinya Pencurian Tenaga Listrik	
yang Dilakukan Oleh Oknum	81

B. Kerugian yang Ditanggung Konsumen Listrik di Desa Secanggih Terkait Pencurian Tenaga Listrik Oleh Oknum	87
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016	84
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Listrik sebagai sumber energi dan penerangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Ketergantungan manusia akan listrik terjadi karena listrik merupakan satu-satunya energi yang mampu menjalankan segala bentuk aktivitas operasional, pengelolaan, pengendalian sarana komunikasi dan informasi di kantor, perusahaan, instansi pendidikan maupun kegiatan rumah tangga. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hampir keseluruhan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan tenaga listrik.

Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggungjawab menyediakan pelayanan listrik kepada masyarakat sebagai konsumen yang membutuhkan ketersediaan tenaga listrik. Tenaga listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, listrik merupakan salah satu hajat hidup orang banyak, oleh karena itu dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menyebutkan “bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang penyelenggaraanya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah”. Penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu.

Pelayanan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada konsumen masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa masalah kelistrikan yang dialami oleh konsumen yang menyebabkan kerugian yang diderita konsumenn seperti pencurian arus listrik yang dilakukan sebagian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga membuat voltase naik turun (berakibatkan rusaknya alat-alat elektronik rumah tangga), dan pemadaman listrik secara sepihak oleh PLN, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen listrik. Perlindungan konsumen itu merupakan hak setiap konsumen dan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.¹

¹ Mieker Komar, *Cyber law*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.2.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.²

Perlindungan konsumen dilakukan dengan:³

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;
2. Melindungi kepentingan konsumen ada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Membeikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.⁴

² Nasution Al, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1945), h. 19.

³ Eman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 7.

Masalah perlindungan konsumen di jamin oleh agama. Hak konsumen yang dicerai termasuk katagori jual beli yang bathil, sebagaimana tercantum dalam QS. An-nisa: 4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Bagimu”*.

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yakni dengan jalan yang bathil. Akan tetapi, memerintahkan untuk memperoleh sesuatu yaitu dengan jalan yang di ridhoi Allah SWT dengan yang berlaku suka sama suka.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *dan janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu, di antara*

⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kamu dengan jalan yang bathil, yakni tidak sesuai tuntutan syariat. *Tetapi* hendaklah kamu memperoleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁵

Sistem pembayaran listrik yang dilakukan di Indonesia adalah dengan menghitung daya yang dipakai, baik dengan system Pascabayar maupun Prabayar⁶. Pengukuran daya yang terpakai dilakukan seorang petugas untuk suatu daerah tertentu, yang datang dari rumah ke rumah, bertugas untuk mencatat nilai yang tertera pada *kilowatt-hour* (KWh) meter per bulannya. Setelah itu pemilik rumah harus membayar listrik pada tempat-tempat pembayaran listrik yang telah di tentukan, atau melalui fasilitas yang disediakan oleh bank misalnya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

PT. PLN (Persero) sebagai pihak yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian (pihak pertama dan pihak kedua yang

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (jakarta: Lentera Hati, 2002), h.497.

⁶ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nmor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 3

mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut).⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah/ 4 : 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”*⁸

Di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, bagi pemasangan baru maupun bagi pelanggan yang berpindah dari pasca bayar ke pra bayar, pada prinsipnya sama, yaitu berisikan klausula-klausula baku yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero). Perjanjian baku⁹ adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dimana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Dan mengenai penandatangananannya, meskipun si penandatangan tidak membacanya, tetap dianggap telah menyetujui isinya. Isi klausula perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar yang diterbitkan oleh PT. PLN (Persero) hampir secara keseluruhan serta hal-hal yang berkaitan dengannya berada dalam kebijakan PT. PLN

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian baku dalam praktik perusahaan perdagangan*, (bandung : citra aditya bakri, 1992) h. 6

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1990) h. 136

⁹ Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 3

(Persero), sehingga PT. PLN (Persero) memiliki keleluasaan untuk menetapkan ketentuan dan persyaratan

Di desa Secanggang penggunaan sistem pembayaran masih dengan sistem Pascabayar, yaitu melakukan pembayaran listrik di tempat-tempat tertentu, sehingga memiliki kelemahan antara lain kemungkinan adanya tunggakan listrik, Masyarakat sebagai pengguna tenaga listrik yang merasa dirugikan akibat tidak jelasnya perlindungan terhadap mereka, salah satu penyebabnya dikarenakan oleh lemahnya hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, selain itu pihak masyarakat sebagai konsumen yang merasa dirugikan tidak pernah melapor kepada pihak yang terkait atau pihak yang berwenang terhadap kerugian yang dideritanya, seperti isu masyarakat sebagai konsumen yang sangat menarik saat ini adalah soal sering terjadinya melonjaknya pencatatan tagihan rekening listrik dan naik turunnya voltase listrik akibat pencurian arus listrik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dimana terdapat ketidaksesuaian jumlah pemakaian arus listrik yang tertera pada *kilowatt-hour* (KWh) Meter dengan jumlah pemakaian arus listrik yang tertera pada tagihan rekening listrik dan rusaknya alat-alat elektronik rumah tangga konsumen, sehingga konsumen listrik sering mengalami melonjaknya jumlah pembayaran rekening listrik yang dimilikinya.

Lebih lanjut lagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik, dalam Fatwa tersebut MUI menegaskan:

- 1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan;
- 2) Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif pemakaian listrik secara ilegal ditimbulkan, baik ekonomi maupun sosial;
- 3) PLN perlu melakukan langkah – langkah promotif, preventif, kuratif, dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat;
- 4) Aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara ilegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya;
- 5) Masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdayaguna;
- 6) Seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktek pemakaian listrik secara ilegal.

Pada dasarnya tindakan penyalahgunaan atau kecurangan dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang melanggar nilai agama. Termasuk penyalahgunaan aliran listrik. Dewasa ini, penyalahgunaan aliran listrik juga telah sampai pada tingkat yang meresahkan, merugikan, serta membahayakan masyarakat sebagai konsumen. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa dampak penyalahgunaan listrik, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada lingkungan, serta baik secara agama, materi, maupun sosial.

Hadirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang pencurian Arus Listrik merupakan wujud kepedulian Majelis Ulama Indonesia terhadap maraknya penyalahgunaan listrik. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 juga dapat menjadikan salah satu pendekatan dari sisi agama tentang kesadaran akan pentingnya penggunaan listrik secara legal sesuai dengan peraturan yang ada.

Melihat fenomena yang terjadi di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat masih banyak terjadi pencurian arus listrik sehingga menyebabkan konsumen yang tidak terlibat sama sekali merasa dirugikan.

Pihak atas nama Siti Hajar usia 47 (empat puluh tujuh tahun) melakukan pembayaran rekening listrik yang tidak sesuai dengan penggunaan listrik per

satu bulannya, yang biasanya ibu Siti Hajar hanya terkena jumlah perbulannya paling tinggi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melunjak menjadi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan tetangganya yang bernama Baharuddin hanya terkena Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) walaupun sebenarnya pemakaian arus listrik yang tertera pada *kilowatt-hour* (KWh) Meter sama tetapi berbeda dengan tagihan rekening listriknya.

Dengan melihat latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH OKNUM MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA NOMOR 17 TAHUN 2016”**. (Studi Kasus Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum Terhadap Konsumen menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Positif Indonesia?

2. Bagaimana Praktek Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum dan Dampak Negatif yang Dirasakan oleh di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana Perlindungan Konsumen Listrik di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui Praktek Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum dan Dampak Negatif yang Dirasakan oleh Konsumen di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Listrik di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ditinjau Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimana yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pencurian arus listrik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 tahun 2016.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta pada praktisi hukum, akademisi dalam masalah perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pencurian arus listrik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 tahun 2016.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan informasi kepada masyarakat

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah.¹⁰ Sehingga masih perlu diuji atau dibuktikan dalam kegiatan penelitian. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan yang telah dilakukan, maka hipotesis penelitian penulis menyatakan bahwa terdapat pencurian tenaga arus listrik sehingga menyebabkan masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif.

1. Jenis Penelitian

Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan tentang penyelesaian

¹⁰ Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), h. 41.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35

perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pencurian listrik oleh oknum menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain: pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*), pendekatan sejarah (*Historical Approach*), dan pendekatan filsafat (*Philosophy Approach*), pertama pendekatan konseptual (*Concept Approach*) hukum menurut Peter Mahmud¹², beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukm. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sedangkan *Historical Approach* menurut Peter Mahmud¹³, dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.

¹² *Ibid*, h. 95

¹³ *Ibid*, h. 126

Pendekatan filosofi menurut, Jhonny Ibrahim, untuk mengupas secara mendalam, sedangkan menurut Zeihgler dalam Jonny Ibrahim, pendekatan filsafat yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan pandangan-pandangan terhadap masyarakat atau sekelompok masyarakat.

Pendekatan filsafat ini juga dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan filosofis ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang mendasar. Disamping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

3. Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) bahan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari data primer (primary data atau basic data) adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, atau langsung dari masyarakat atau diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer yang digunakan terutama berpusat dan bertitik tolak pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor

17 Tahun 2016 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian seperti:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang_undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang didapatkan dari buku-buku bacaan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang yang terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa perundang-undangan. Teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa perundang-undangan. Teori-teori dalam buku terdiri dari pandangan-pandangan para ahli yang kemudian dikompilasi untuk menjadi rujukan dalam menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pencurian arus listrik oleh oknum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitanya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I : Berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi masalah tinjauan umum dari perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat pencurian tenaga listrik oleh oknum pada umumnya, (pengertian, dasar hukum dari perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen terkait pencurian tenaga listrik oleh oknum).

BAB III : Berisi pembahasan mengenai perlindungan konsumen menurut hukum positif dan Majelis Ulama Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016).

BAB IV : Berisi pembahasan dari hasil penelitian serta merupakan jawaban dari rumusan masalah, (Proses dan faktor-faktor terjadinya Pencurian Tenaga Listrik yang Dilakukan oleh oknum, Kerugian yang diderita konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016).

BAB V : Merupakan kesimpulan penutup yang terdiri atas kesimpulan penelitian ini, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

3. Pengertian Konsumen

Sebagai suatu konsep, “Konsumen telah di perkenalkan beberapa puluh tahun lalu di berbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memeberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilannya. Sejarah denggan perkembanganya itu, berbagai Negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengaturan kepada konsumen, disamping itu, telah pula berdiri organisasi konsumen internasional, yaitu *Internasional Organization Of Consumer Union (UICO)*. Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen di Bandunh, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.¹⁴

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.¹⁵ Begitu pula dalam kasus Bahasa Inggris-Indonesia yang

¹⁴ Nurmadjito, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 12.

¹⁵ A.S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford Univercity Press, 1987), h. 183.

memberi arti kata *cunsumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus besar Bahasa Indonesia Konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri (bahan pakaian dan makanan).¹⁶

Samsul memberikan definisi konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian hadiah, dan undangan.¹⁷ Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan juga konsumen dengan cara mengambil alih pengerian yang digunakan oleh keputusan Belanda, yaitu: “semua individu yang menggunakan barang dan jasa”.¹⁸

Adapun kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda/atau jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diesten*) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*).¹⁹

¹⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed, 3: Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h. 750.

¹⁷ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), h. 34.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentuk Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 48.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan, maka konsumen dibedakan kepada 3 (tiga) batasan, yaitu:

- a. Konsumen Komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- b. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup

²⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 173.

lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan untuk mencari keuntungan kembali.²¹

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan hak penting konsumen menurut Pasal 4, ada 9 (sembilan) hak dari hak konsumen, delapan diantaranya hak yang secara eksplisit diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan satu Hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hak-hak tersebut adalah:²²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang diperoleh sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi barang dan/jasa tersebut;²³

²¹ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 13.

²² Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 175.

²³ Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 41.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk memutuskan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.²⁴ Hak memilih hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu. Apabila suatu produk dikuasai secara monopoli oleh produsen maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak berfungsi;²⁵
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hak atas informasi ini sangatlah penting sebab tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk. Hak ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai

²⁴ *Ibid*, h. 41.

²⁵ *Ibid*, h. 41

dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam menggunakan produk.²⁶ Informasi tersebut dapat pula disampaikan secara lisan maupun tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik.²⁷ Informasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dari konsumen untuk memilih produk serta meningkatkan kesetiaannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memiliki kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen;²⁸

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk

²⁶ Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 41.

²⁷ *Ibid*, h. 42.

²⁸ *Ibid*, h. 42.

tertentu apabila informasi tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perseorangan, maupun secara kolektif, baik disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya melalui Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI);²⁹

- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum;
- 6) Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan

²⁹ *Ibid*, h. 42.

produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih produk yang dibutuhkan;³⁰

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan penjelasan terhadap konsumen agar diperlakukan benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian). Untuk merealisasikan

³⁰Ahmad Miru dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h. 43-44

hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan;³¹

- 9) Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.³²

b. Kewajiban Konsumen

Adapun mengenai kewajiban konsumendijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dari produser pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar rupiah yang disepakati;

³¹ *Ibid*, h. 45.

³² *Ibid*, h. 46.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³³

D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen pada dasarnya memiliki posisi tawar yang lemah dan terus melemah, hal ini disebabkan:

- a. Terdapat lebih banyak produk, merk, dan cara penjualannya;
- b. daya beli konsumen makin meningkat;
- c. lebih banyak variasi merk yang beredar dipasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang;
- d. Model-model produk lebih cepat berubah;
- e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam pelaku usaha;

³³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Ed. I ; Cet, IV: Jakarta:Sinar Grafika, 2014), h. 41.

- f. Iklan yang menyesatkan dan wanprestasi oleh pelaku usaha.³⁴

Posisi konsumen sangat lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Menurut AZ Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa didalam kehidupan masyarakat.³⁵

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 9.

³⁵ Az, Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu pengantar*, (Cet. II; Jakarta: Diadit Media, 2006), H. 37.

perlindungan kepada konsumen.³⁶ Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima (5) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

³⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 173.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁷

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, dapat dikatakan pembentuk undang-undang menyadari bahwa perlindungan hukum bagi konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda, satu sisi merupakan konsumen, sedangkan sisi yang lainnya pelaku usaha, dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi

³⁷ Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 208.

sekaligus. Undang-undang perlindungan konsumen dengan jelas mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau/ jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Membutuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁸

³⁸ Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dalam buku Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 175.

C. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam

1. Sejarah Perlindungan Konsumen dalam Islam

Sebelum islam datang, Mekkah telah menjadi pusat perhatian seluruh kabilah jazirah Islam karena adanya Ka'bah, dan suku Quraisy yang berdomisili di Mekkah di kenal sebagai penjaga ka'bah yang merupakan tempat suci bagi bangsa Arab. Suku Quraisy mendapat keuntungan besar atas status mereka sebagai pemelihara Ka'bah, terutama dalam hal perdagangan.³⁹

Keuntungan suku Quraisy tersebut di petik dalam skala yang lebih besar, yakni terjalinnya hubungan politik ekonomi dan perdagangan yang lebih luas. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya perizinan perjalanan dan jaminan keamanan berdagang (*aylaf*) bagi suku Quraisy dari penguasa Negara-Negara tetangga, pada waktu itu adalah Irak, Syria, Yaman, dan Eropa, karena pada itu pula Mekkah dianggap sebagai ibukota jazirah Arab, dan juga di pandang sebagai pusat perdagangan jazirah Arab.⁴⁰

³⁹ Perdagangan bagi suku Quraisy dan bangsa Arab Umumnya merupakan fakta yang terjadi sebagai akibat dari tandus dan gersangnya wilayah arab, sehingga sector pertanian buah menjadi pilihan utama bagi bangsa Arab. Lihat dalam Jusmani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 47.

⁴⁰ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Tintamas, 1984), h. 23.

Pada saat itu, Mekkah telah mencapai kesuksesan yang sangat mencengangkan. Kota itu berubah menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang dan modalnya telah menjadi kaya raya melampaui impian-impian tertinggi mereka. Hanya beberapa generasi pendahulu mereka hidup dalam kemeralatan dan serba kekurangan, kini Mekkah telah menjadi kiblat perdagangan.⁴¹

Keberhasilan bangsa Quraisy dalam perdagangan bukan tanpa alasan. Dalam *The Wealth of Nations*, Adam Smith yang dianggap sebagai bapak Ilmu Ekonomi, mengutip buku *Doctor Pocock*, yang menceritakan bahwa ketika para pedagang Muslim akan memasuki suatu kota untuk berjualan, mereka akan mengundang orang-orang yang lewat, termasuk orang miskin, untuk makan bersama dan bersila, memulai makan dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah. Demikianlah kiat para pedagang muslim memelihara kepentingan bisnisnya, yakni dengan bermurah hati dan sambutan yang hangat.⁴²

Muhammad ibn Habib Bagdadi dalam bukunya *Kitab Al-Muhabbah*, mencatat tiga belas festival perdagangan di Jazirah Arab pada zaman

⁴¹ Karen Armstrong *Muhammad Prophet for our time* (Bandung: Mizan, 2007), h.57.

⁴² *Ibid*, h.13.

jahiliseluruh pasar dagang ini mampu mengundang pedagang dan pembeli dari timur dan selatan secara berkelompok untuk melakukan perdagangan.⁴³

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam islam dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW (sebelum diangkat menjadi Rasulullah) membawa barang dengan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan dan/atau upah. Kendatipun tidak banyak literature yang berbicara tetang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan Rasulullah, namun dapat menemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah.

Kejujuran keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya.⁴⁴

Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.

⁴³ Sami bin Abdullah al-Maghlust, *Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad* (Jakarta: Al-Mahira, 2009) h. 65.

⁴⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 49.

Perdagangan yang adil dan jujur menurut Al-qur'an adalah perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahannya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meniggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimulah hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Sepintas ayat ini berbicara tentang riba, tetapi secara implicit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di Akhir ayat tersebut dijelaskan tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (tidak dizalimi dan tidak pula menzalimi). Dalam konteks perdagangan, tentu saja potongan akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsmen maupun hak-hak produsen.

Konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan bisnis. Fakta menunjukkan bahwa Rasulullah telah banyak memberikan contoh dalam melakukan perdagangan secara adil dan jujur. Selain itu pula, Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip yang mendasar tentang pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Salah satu prinsip yang diletakkan Rasulullah adalah berkaitan dengan mekanisme pasar, dalam interaksi perdagangan kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas tanpa ada campur tangan, investasi, dan paksaan dalam harga.⁴⁵

Namun jika pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana terjadi kasus penipuan, penimbunan, atau perusakan pasokan dengan tujuan menaikkan harga yang berujung pada kerugian konsumen. Maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitsi oleh pihak lain.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Tintamas, 1984), h. 55.

⁴⁶ Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasca Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Nur Ihsani, 2008), h. 28.

Setelah Rasulullah hijrah dan berkuasa di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjerumus kepada penzaliman telah dihapus dan dilarang melakukannya. Seperti penahanan stok, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.⁴⁷ Praktik-praktik perdagangan yang dilarang pada masa Rasulullah SAW di Madinah diantaranya:

- a. *Talaqqi Rukban*, ialah mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat memproduksi sebelum sampai kepasar. Rasulullah melarang keras tindakan ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang harga barang;
- b. *Gisyah*, ialah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga mencampurkan produk cacat kedalam barang yang berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan, dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk barang yang cacat atau kualitas buruk. Adapun, pada hakikatnya konsumen membutuhkan informasi yang jelas tentang kualitas barang yang akan dibeli;

⁴⁷ Muhammad Akram Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi* (Jakarta: Bank Muamalat, 1996) h. 151.

- c. *Perdagangan Najasy*, ialah praktek perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawarkan tinggi harga barang disertai pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang;⁴⁸
- d. *Produk haram*, ialah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh A-Qur'an dan Sunnah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen dalam memberi barang dagangan tersebut, baik keselamatan jasmaniah maupun keselamatan rohaniyah;
- e. *Riba*, ialah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang berlangsung secara lazim dan bertentangan dengan prinsip muamalat secara ilmiah;
- f. *Tahfif*, ialah tindakan yang mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual, tentu saja praktik perdagangan seperti ini sangat merugikan konsumen.

Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan Rasulullah

⁴⁸ Abdul Futur Habiri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 56.

mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Ketentuan-ketentuan larangan tersebut membuktikan secara terang benderang bahwa praktik perdagangan yang diajarkan Islam berpijak dari perlindungan hak-hak konsumen. Kendatipun pada saat itu terminologi “konsumen” belum dikenal. Karena itu pula, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pokok ajaran Islam dalam perdagangan.

Uraian tersebut juga membuktikan, bahwa sebelum barat dan dunia modern mengenal pengaturan perlindungan konsumen, islam telah menjalankan prinsip prinsip perlindungan konsumen. Namun pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada masa Rasulullah tersebut belum terperinci secara empiris, karena terbatas teknologi pada saat itu. Kendatipun demikian, Rasulullah telah berhasil meletakkan dasar-dasar perlindungan konsumen akhirnya diadopsi oleh dunia modern sekarang. Hal ini sekaligus bantahan terhadap beberapa penulis yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh barat adalah sumber dan pendekar perlindungan konsumen. Bandingkan dengan perhatian dan visi Rasulullah terhadap perlindungan konsumen yang melebihi dari perhatian dan visi tokoh-tokoh barat tersebut, karena Rasulullah melakukan perdagangan atas dasar kejujuran, keadilan, transparansi, dan keimanan.

2. Hak-hak Konsumen Persepektif Islam.

Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan perlindungan konsumen secara empiris seperti saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi bakal produk hukum perlindungan konsumen modern.⁴⁹

Seluruh ajaran islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen. Karena Islam mengkehendaki adanya unsur keadilan, keadilan dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktek perdangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak-haknya dengan perdagangan yang dikenal dengan istilah *Khiyar* dengan beragam jenisnya sebagai berikut:⁵⁰

a. *Khiyar Majelis*

As-sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki *Khiyar* (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam 1 (satu) majelis (Belum berpisah). *Khiyar* merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha dan konsumen, jika terjadi

⁴⁹ *Ibid*, h. 58.

⁵⁰ *Ibid*, h. 58-59.

ijab dan kabul antara produsen dan konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam 1 (satu) jenis;

b. Khiyar Syarat

Khiyar Syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *Khiyar* selama jangka waktu yang jelas. Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua belah pihak yang berakad secara bersama-sama, juga boleh bagi salah satu pihak saja ia mempersyaratkannya;⁵¹

c. khiyar Aibi

haram baginya seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat produk) tanpa menjelaskan kepada pembelinya (konsumen);

d. Khiyar Tadlis

yaitu jika penjual mengelabui pembeli sehingga menaikkan harga barang, maka haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki *khiyar* selama tiga hari, adanya khiyar ini untuk mengembalikan barang tersebut;

⁵¹ *Ibid*, h.59.

e. khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)

khiyar jenis ini suatu yang menjadikan hak dan suatu saat bisa menjadi hak pembeli. Kadang kala pembeli membeli barang dengan harga 5 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Atau penjual menjual barang dengan harga 10 dinar, padahal barang tersebut hanya setara dengan 8 dinar, jika seseorang penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memilih *khiyar* untuk menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad;

Khiyar jenis ini pada dasarnya terdapat syarat didalamnya, hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah. Hayan bin Munqiz pernah mendatangi Rasulullah, lalu Hayan bin Munqiz berkata: “ ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah ditipu dalam jual beli”.⁵²

f. Khiyar Ru'yah

Khiyar jenis ini terjadi bila pelaku usaha menjual barang dagangannya sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berharap terhadapnya, atau pembeli melihat bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, atau pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut;⁵³

⁵²Ibid, h. 62.

⁵³Ibid, h. 62.

g. Khiyar Ta'yin.

Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembeliannya untuk memilih barang yang diinginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dia jual kendatikan barang yang dia jual kendatikan barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki. Misalnya, seseorang membeli 4 ekor kambing dari sekumpulan kambing, maka pembeli diberi hak Khiyar ta'yin sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang dia inginkan diantara sekumpulan kambing itu.

Sekilas memang istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam islam berbeda dengan istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini. Namun jika dikaji secara mendalam dari sisi nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. Dibandingkan antara Khiyar alibi dengan *the right to safety*, *khiyar ta'yin* dengan *the right to choose*, *khiyar tadlis* dan *aibi* dengan *the right to be informed*, *khiyar ru'yah* dengan *the right to be heard*.

D. Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum

1. Pengertian Listrik

Listrik adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang serba modern ini. Program pemerintah untuk menggalakkan listrik masuk desa dan

pendalaman sudah di galakkan mulai dari puluhan tahun lalu. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah sadar bahwa zaman yang semakin maju menuntut manusia membutuhkan listrik untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manfaat listrik memang tidak bisa diragukan lagi. Untuk alasan itu pula berbagai hal mengenai listrik dipelajari termasuk pengertian listrik menurut para ahli. Bahkan, di beberapa sekolah menengah atas dan perguruan tinggi terdapat jurusan yang secara khusus mempelajari mengenai listrik.

Listrik berasal dari bahasa inggris *electricity* atau *electric* atau *electrical*, Listrik adalah sesuatu yang memiliki muatan positif (proton) dan muatan negatif (elektron) yang mengalir melalui penghantar (inductor) dalam sebuah rangkaian. Pengertian listrik lainnya dikemukakan oleh beberapa pakar. Berikut ini adalah pengertian listrik menurut para ahli.

- a. Menurut Gatut Susanta dan Sasi Agustoni, Listrik adalah sumber energi yang disalurkan melalui kabel atau penghantar lainnya;
- b. Menurut Hasan Amrin, Listrik adalah suatu bentuk energi dan listrik hanya salah satu banyak bentuk energi;
- c. Menurut Aip Saripudin, Listrik adalah energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia;

- d. Menurut Joyce James, Colin Baker dan Helen Swain, Listrik adalah aliran atau pergerakan elektron-elektron adalah partikel bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom;
- e. Menurut Mikrajuddin, Listrik adalah salah satu bentuk energi. Selain BBM, Listrik telah menjadi bentuk energi terpenting bagi kehidupan kita;
- f. Menurut Agung Wijaya, Listrik adalah kebutuhan primer manusia;
- g. Menurut Neti lim, Linda, Yulinda, Fransiska, dan Susilawati, Listrik adalah sumber energi yang sangat penting bagi manusia;
- h. Menurut Heinz Frick dan Pujo L. Setiawan Listrik merupakan Energi yang dapat di ubah menjadi energi lain, menghasilkan panas, cahaya, kimia, atau gerak (mekanik).

2. Pengertian pencurian Tenaga Listrik

Pencurian diatur dalam bab XXII tentang “pencurian” dari Pasal 362 – Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bab tersebut terdapat berbagai ketentuan mengenai pencurian yang dilakukan dalam berbagai kondisi dan cara. Selain bisa merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena ini mengenai pencurian listrik, maka merujuk juga pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenglistrikan.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Nomor 17 Tahun 2016 Pencurian Tenaga Listrik adalah penggunaan/ pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi-sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal.

Pertanyaanya, apakah pencurian aliran listrik dapat dikenkan pasal pencurian? Untuk itu harus dilihat terlebih dahulu unsu-unsur dari tindak pidana pencurian. Pencurian, salah satunya, diatur dalam pasal 362 KUHP sebagai berikut “ *barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karen pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900-, (sembilan ratus rupiah).*

Terkait pasal ini menjelaskan bahwa ini adalah “R. Soesilo menjelaskan bahwa ini adalah “pencurian biasa”, elemen-elemenya sebagai berikut:

1) Perbuatan mengambil

Mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

- 2) Yang diambil harus sesuatu barang.

Barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut listrik termasuk sebagai barang yang dapat dijadikan objek pencurian. Mencuri listrik bukanlah sebuah analogi dalam hukum pidana karena listrik merupakan barang. Jadi, apabila semua elemen-elemen diatas terpenuhi, maka pelakunya diancam dengan hukuman penjara paling lama (5) tahun atau denda paling banyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)., (sebagaimana telah di sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP).⁵⁴

⁵⁴ Soesilo.R, *Kitab undang-undang pidana* (Politela, Sukabumi, 1991) hal. 249-250

Selain dalam KUHP, mengenai menggunakan listrik yang bukan haknya diatur secara khusus dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai berikut: *“Setiap orang yang mengenakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).*

Dalam hukum terdapat suatu asas yaitu *“Lex Specialis Derogat Legi Generali”*. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat umum (*generalis*).

Berarti ketentuan pidana yang dipakai apabila terjadi tindak pidana pencurian listrik adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ketenagalistrikan.

BAB III
PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

B. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Maka hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen.

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut yusuf shofie, undang-undang perlindungan konsumen di indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;
- b. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

Dengan adanya pengelompokan ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat diperinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keselamatan fisik;
- 2) Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
- 3) Standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
- 4) Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
- 5) Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
- 6) Program pendidikan dan penyebarluasan informasi;
- 7) Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.

Didalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan pasal 2 UUPK. Kelima (5) tersebut adalah:

1) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-sebesarnya bagi kepentingan konsumen;

2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen;

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materii ataupun spiritual;

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Kejahatan terhadap konsumen adalah suatu jenis kejahatan kebanyakannya merupakan *white collar crime*, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja, tindakan dimana bertentangan dengan hukum pidana, dan dapat merugikan materi dan immaterial kepada para konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk, barang maupun produk jasa, termasuk kerusakan dari produk itu sendiri maupun csrs memproduksi, menjual, memasarkan, mengiklankan, atau menyusun terhadap produk tersebut.

Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negara-negara maju, adalah semakin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen. Apabila dimasa yang lalu pihak produsen dan industriawan yang dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian lebih besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian

sesuai dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak konsumen yang dipandang lebih lemah hukum perlu mendapat perlindungan lebih besar dibanding masa-masa yang lalu. Maka dari itu untuk melindungi hak-hak konsumen maka dibuatlah undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Konsumen dilindungi karena ucapkali konsumen terjepit dalam lalu lintas perdagangan sehari-hari tanpa suatu upaya hukum yang memadai. Undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak tersebut dilanggar, berpotensi untuk terjadinya kejahatan terhadap konsumen. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni “pelaku usaha mempromosikan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum UUPK diberlakukan, beberapa perbuatan yang merugikan konsumen belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Tetapi dengan berkembangnya dunia industrial dan perdagangan melahirkan dampak kerugian publik. Pemerintah kemudian mengantisipasi masalah itu dan kemudian

memformulasikannya dalam bentuk hukum pidana, inilah yang disebut dengan kriminalisasi perlindungan konsumen.

Berbagai peraturan yang mengatur ketentuan pidana untuk melindungi konsumen sudah banyak yang diberlakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen meskipun belum terpadu dan komprehensif.

1. Ketentuan dalam KUHP

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 aturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang. Hal itu bisa dilihat misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Pasal 204 KUHP

Ayat 1:

Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat bahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun.

Ayat 2:

Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 (duapuluh) tahun;

b. Pasal 205 KUHP

Mengatur tentang perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan barang-barang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat yang berbahaya oleh pembeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300,- (tiga ratus rupiah). Jika mengakibatkan matinya orang, si bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan barang-barang itu disita;

c. Pasal 359 KUHP

Kealpaannya yang menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pasal 360 KUHP

Kealpaannya yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun (ayat 1). Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) (ayat 2);

e. Pasal 382 KUHP

Tentang tindakan menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui kadaluarsa diancam penjara paling lama 4 (empat) tahun;

f. Pasal 382 bis KUHP

Mengatur mengenai perbuatan mendapat, melangsungkan, atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain, perbuatan curang dengan menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu, diancam jika karena itu timbul kerugian-kerugian bagi konkuren-konkuren atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan

curang,dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah);

g. Pasal 383 KUHP

Mengancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, penjual yang berlaku curang terhadap pembeli karena sengaja menyerahkan barang lain yang ditunjukan untuk dibeli, juga terhadap pembeli mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat;

h. Pasal 386 KUHP

Yang mengatur mengenai makanan, minuman atau obat-obatan palsu, dimana perbuatan pemalsuan dari pihak penjual, penawar yang menyerahkan makanan, minuman dan obat-obatan itu tidak diberitahukannya kepada pembeli;

i. Pasal 390 KUHP

Manentukan, dimana seseorang dengan maksud ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan.

2. Ketentuan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Aturan terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijumpai dalam sejumlah pasal. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan secara limitatif tentang perbuatan-perbuatan di bidang konsumen yang dapat dikriminalisasi. Pasal-pasal yang dapat dikriminalisasi menurut Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Pasal 8 mengenai larangan memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa;
- b. Pasal 9 mengenai penawaran, promosi atau mengiklankan untuk perdagangan barang dan/atau jasa secara tidak benar;
- c. Pasal 10 mengenai penawaran, promosi atau pengiklanan untuk perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak benar atau menyesatkan;
- d. Pasal 11 mengenai penjualan dengan cara obral atau lelang dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen;
- e. Pasal 12 mengenai menawarkan atau mempromosikan tetapi tidak bermaksud melaksanakannya sesuai waktu dan jumlah yang ditawarkan atau dipromosikan;

- f. Pasal 13 ayat (1) mengenai hal menjanjikan memberi hadiah barang dan/jasa secara Cuma-Cuma, tetapi bermaksud tidak memberikannya sebagaimana yang dijanjikan;
- g. Pasal 13 ayat (2) mengenai hal menawarkan atau mempromosikan obat, suplemen makanan, alat kesehatan termasuk jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah barang atau jasa;
- h. Pasal 14 mengenai hal menawarkan barang melalui undian yang melewati batas waktu yang dijanjikan, tidak diumumkan melalui media massa, hadiah tidak sesuai janji, mengganti hadiah tidak sesuai yang dijanjikan;
- i. Pasal 15 mengenai pemaksaan kepada konsumen secara fisik atau psikis;
- j. Pasal 16 mengenai penawaran yang tidak menepati pesanan atau tidak menepati janji suatu pelayanan;
- k. Pasal 17 ayat (1) mengenai perusahaan iklan yang memproduksi iklan yang bersifat mengelabui, menginformasikan secara salah, tidak memuat informasi tentang resiko atau melanggar etika periklanan;
- l. Pasal 17 ayat (2) mengenai perusahaan iklan yang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

PT. PLN (Persero) yang diberi kuasa ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan Nasional Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Khususnya untuk ikut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum, sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedikit banyaknya telah membuat lega masyarakat yang notabene nya adalah konsumen. Namun sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan. Masyarakat indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas . Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat tata usaha negara yang terlambat

merealisasikan pelayanan kepada masyarakat. Ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan.⁵⁵

Asas dan tujuan yang dianut Undang-Undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁵⁶ Telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik. Pelanggaran terhadap ini tentu ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan.⁵⁷

Pelanggan pengguna listrik merupakan konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, beberapa hak pelanggan pengguna tenaga listrik antara lain:

⁵⁶ Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan Jo. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

⁵⁷ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia), h. 173.

1. Mendapat pelayanan yang baik;
2. Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu keandalan yang baik;
3. Memproleh tenaga listrik dengan harga yang wajar;
4. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan listrik, dan
5. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Sebagai penikmat, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki kewajiban-kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik, antara lain:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan;
- c. Menjaga keamanan alat pembatas atau pengukur (APP) pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan;
- d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan;

e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya;⁵⁸

f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya.⁵⁹

Oleh sebab itu Sejalan juga dengan isi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan:

- a. Melaksanakan pengaman terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. Menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. Melintas di atas atau di bawah bangunan yang di bangun di atas atau di bawah tanah dan;
- g. Memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.⁶⁰

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT.PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

⁵⁸ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Arifin, Petugas Harian P2TL, PT. PLN (Persero),(Secanggang:15 September, 2018) di. Secanggan.

⁶⁰Yuliati, *Perlindungan Hak-hak Konsumen*,(Malang:Kencana), h.123.

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pelaksanaan penertiban ini juga telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan pelanggan, yaitu pencantuman pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Tiap pelanggaran hukum listrik dapat membawa si pelaku ke meja hijau. Perangkat hukum yang ada saat ini setiap saat siap membawa si pelaku pelanggaran hukum listrik/manipulasi angka pemakaian *kilowatt-hour* (kWh) ke sidang pidana. Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah dapat menjaring pencuri listrik sebagai pelaku pidana pelanggaran hukum dan pidana korupsi/manipulasi.

Hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jual beli arus listrik

1. Mencatol aliran listrik

Menyambung dengan kabel langsung ke jaringan instalasi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memperoleh aliran listrik dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Menyambung langsung (mencantol) dengan kabel ke jaringan instalansi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk penerangan jalan lingkungan/sarana umum. Walaupun sifatnya untuk kepentingan umum, hal ini tetap tidak dibenarkan. Jalan keluarnya adalah warga dapat mengajukan permohonan secara kolektif Rukun kepada Pemda setempat sebagai penanggungjawab pelaksana;

2. Mempengaruhi daya

Pelanggan tidak mencatol kabel, tapi dengan keahlian sendiri mencoba mengubah alat pembatas daya (sekering MCB), agar daya di rumah Pelanggan lebih besar. Tanpa kesepakatan PT.PLN, cara mengubah itu sama ilegalnya dengan menyantol;

3. Memperlambat putaran kWh Meter

Pada beberapa kasus petugas yang mencatat angka *kilowatt-hour* kWh Meter pelanggan, menemukan kelicikan para pelanggan dan oknum yang

mengatur putaran *kilowatt-hour* kWh meternya dengan alat yang sederhana. Sebuah cara yang lebih licin ktimbang menyantol. Para pelanggan yang melakukan ini tentu berharap rekening yang dibayarnya nanti, akan jauh lebih kecil dari angka yang dicatat petugas.

Pasal 45 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggunakan Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dengan Pasa 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dimaksud dengan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

Ini berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengakui adanya dua jalur penyelesaian yang dapat dilaksanakan melalui:

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. Peradilan.

3. Hubungan Antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Kelistrikan dalam Persfektif Hak.

Efektif atau tidaknya perlindungan konsumen suatu negara tidak semata-mata bergantung pada lembaga konsumen, tetapi juga kepedulian pemerintah, khususnya melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen. Sekuat apapun lembaga konsumen suatu negara, tetapi tidak dilindungi oleh lembaga sejenis dalam biokrasi pemerintah, tidak akan membuahkan hasil yang optimal.

Pertanyaanya adalah apa konstribusi lembaga konsumen untuk memperjuangkan konsumen dalam memperoleh keadilan? Jawabnya tergantung kepada kondisi perkembangan hukum masing-masing negara tetapi paling tidak bisa dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Apabila secara mendasar hak-hak konsumen belum di akomodir dalam hukum positif, peran lembaga konsumen adalah mendorong legislasi Undang-undang Perindungan Konsumen;
2. Apabila suatu negara sudah memiliki Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka lembaga konsumen berkewajiban membatasi

implementasi dan penerapan hukum dari undang-undang tersebut dilapangan.

Dari segi substansi, ada 3 (tiga) pendekatan dalam melindungi konsumen di bawah undang-undang ini, yaitu:

1. Pendekatan holistik

Pada pendekatan holistik ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah perlindungan konsumen, sekaligus menjadi payung undang-undang sektoral yang berdimensi konsumen;

2. Pendekatan Sektoral

Pendekatan Sektoral artinya hak-hak konsumen diakomodir dalam undang-undang sektoral. Misalnya, hak-hak konsumen pangan di atur dalam Undang-Undang Pangan;

3. Pendekatan gabungan

Pendekatan gabungan adalah selain ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih harus dipertegas lagi dalam undang-undang sektoral.

Problem lain yang dihadapi sebagian lembaga konsumen, khususnya di negara berkembang adalah mekanisme konsumen menuntut ganti rugi kepada produsen (*redress mechanism*). Hukum acara perdata konvensional, pada umumnya kurang akomodatif dalam menampung kepentingan konsumsi ini.

1. *Small Claim Court*

Small Claim Court adalah sejenis peradilan kilat, dengan hakim tunggal, tanpa keharusan menggunakan pengacara, biaya ringan dan tidak ada upaya banding. Sengketa konsumen, tidak jarang nilai nominalnya sangat kecil , sehingga sangat tidak praktis bagi konsumen jika harus menuntut produsen ke peradilan umum, selain biayanya mahal, butuh waktu lama dan prosedurnya rumit. *Small Claim Court* ini memberikan akses kepada konsumen untuk menuntut produsen, walau nilai nominal kasus kecil;

2. *Class Action*

Class Action dalam sengketa konsumen, pada umumnya yang menjadi korban bersifat massal. Secara teknis, agak susah bagi konsumen yang dirugikan apabila mengajukan gugatan perdata (Pasal 123 HIR). Dalam hal ini harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara, padahal kasusnya sama. Dengan gugatan class action terhadap kasus yang sama, cukup diwakili oleh beberapa korban yang menuntut secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berpihak kepada korban dimenangkan, maka korban lain yang tidak mengajukan gugatan, juga dapat meminta ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan baru;

3. Beban Pembuktian Terbalik

Beban pembuktian terbalik dalam sengketa konsumen adalah apabila konsumen mengajukan gugatan, maka konsumen harus membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian di pihak konsumen.

Selama tahun 1997 hingga awal tahun 2019, peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari ketidakadilan pihak produsen atau pemerintah silih berganti. Dari kiecelakaan jasa transportasi (kereta api, pesawat udara kapal laut dan bus) kasus keracunan makanan, likuidasi 16 (enambelas) bank bermasalah, pencurian tenaga listrik oleh beberapa oknum baik itu perorangan atau korporasi, sehingga menyebabkan pemadaman aliran-aliran listrik yang disuplai PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kesan yang dapat disimpulkan dari semua data diatas adalah bahwa posisi konsumen di Indonesia masih sangat lemah. Dari aspek aspek hukum, lemahnya posisi konsumen terjadi tidak hanya dari aspek materi hukum, tetapi juga dari sisi kelembagaan hukum dan budaya hukum.

C. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

1. Perlindungan Konsumen Menurut Majelis Ulama Indonesia

Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keputusan atau pendapat yang diberikan, tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam dalam mewujudkan keidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (Pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntutan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dirumuskan 5 (lima) fungsi dan peran utama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- 2) Sebagai pemberi Fatwa (*Mufti*)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa Khadim al Ummah*)
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
- 5) Sebagai penegak *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*.

Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma', yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

Jika merujuk pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan , maka kedudukan Fatwa MUI bukanlah merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut, Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia menurut Yeni Salam Barlinti menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, beberapa fatwa MUI itu tidak mengikat bagi Warga Negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan, apalagi mayoritas penduduk Indonesia notabene nya beragama Islam, jadi Fatwa adalah sumber hukum untuk kita yang harus kita taati.

Lebih lanjut terkait perlindungan konsumen selain Fatwa Majelis Ulama (MUI) Nomor 17 Tahun 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membuat fatwa tentang perlindungan konsumen, yaitu:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaanya.

Dalam Fatwa Majelis Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentag Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaanya, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, atau menyemprot.⁶¹

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia, dengan perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahan yang digunakan itu tidak jelas, dan apakah suci atau tidak, jadi dengan beredarnya kosmetik-kosmetik dipasaran munculah pertanyaan dari konsumen, terutama konsumen muslim terkait standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaanya.

⁶¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Standar Produk Kosmetik dan Penggunaannya*, (Jakarta:2013), h. 9

Bentuk perlindungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013 tertuang pada point ketiga yaitu:

- 1) Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetik halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman;
- 2) Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetik yang diperjualbelikan kepada umat islam;
- 3) LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik yang menggunakan bahan haram, dan najis, baik untuk kosmetik dalam maupun luar.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/VI Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 06 Tahun 2000 yang dimaksud dengan istishna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan (penjual, *shani*).⁶²

Istishna pada saat ini telah diperaktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah, maka dengan itu agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam,

⁶² Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Jual beli Istishna*, (Jakarta:2000), h. 3

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Ishthina* untuk menjadi pedoman.

Bentuk keperdulian Dewan Syari'ah Nasional (DSN) terletak pada point ketiga yaitu:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Penggunaan Vaksin MR (*Measles Rubella*) Produk dari SII (*Serum Intitute Of India*) Untuk imunisasi.⁶³

Dalam Fatwa Majelis Ulama Nomor 33 Tahun 2018 bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Untuk

⁶³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Intitute of India) Untuk Imunisasi*, (Jakarta:2018),h. 7.

mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar yang efektif, salah satunya melalui imunisasi.

Bentuk keperdulian Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Rubella tertera pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2018 pada point kedua yaitu:

- 1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat;
- 2) Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemerintah harus menjamin pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan;
- 4) Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui World Health Organization (WHO) dan negara-negara berpendudukan muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen, sebab pada saat ini konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi

yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha, karena konsumenlah yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.

Jadi hubungannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan perlindungan konsumen, selain menjelaskan dasar hukum atas apa yang produsen itu pakai atau konsumsi baik itu berupa barang dan/atau jasa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merupakan bentuk keperdulian Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap konsumen mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.

2. Fatwa MUI 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Tenaga Arus

Listrik

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016 yang dimaksud dengan pencurian tenaga listrik adalah penggunaan/ pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik

dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi energi, maupun perbuatan yang lain.

Dengan maraknya kasus pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat yang meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat bahwa atas dasar mempertimbangkan masalah tersebut membuat MUI menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik yaitu Fatwa Majelis Ulama (MUI) Nomor 17 Tahun 2016 untuk digunakan sebagai pedoman.

Permasalahan perlindungan konsumen terletak pada point ketiga dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan;
- 2) Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif pemakaian listrik secara ilegal yang ditimbulkan, baik ekonomi maupun sosial;
- 3) PT. Perusahaan Listrik (PLN) perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif, dan kuratif dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat.

Pencurian listrik ini selain merugikan PT. PLN selaku pelaku usaha juga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Di antara kerugian tersebut adalah mengakibatkan jaringan PT. PLN *overload* sehingga menyebabkan gangguan dan pemadaman listrik secara sepihak oleh PT. PLN, kerugian konsumen akibat pemadaman tersebut cukup beragam, Nilai nominal yang diderita konsumen juga beragam, tergantung konsumen tersebut apakah sebagai pelanggan rumah tangga atau pelanggan bisnis. Untuk pelanggan rumah tangga bentuk kerugiannya seperti tidak bisa mandi akibat pompa air tidak berfungsi, tidak bisa menonton televisi bahkan sampai harus membeli lilin sebagai lampu penerangan, dan kerusakan barang-barang elektronik lainnya sebab tiba-tiba terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Bahkan akibat fatal yang dapat di timbulkan dari pencurian listrik yaitu kebakaran yang bisa menghilangkan harta dan nyawa masyarakat sebagai konsumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor dan Proses Terjadinya Pencurian Tenaga Listrik yang Dilakukan Oleh Oknum

1. Faktor-Faktor Pencurian Tenaga Listrik yang Dilakukan Oleh Oknum

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan pada oknum penelitian, peneliti mendapatkan informasi seputar faktor-faktor terjadinya pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum tersebut.

Pencurian tenaga listrik di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat disebabkan antara lain:

- a. masih lemahnya pengawasan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pemakaian tenaga listrik;
- b. kemudahan dalam hal mengubah peralatan listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) termasuk meter pengukur;
- c. penetapan sanksi terhadap pelaku tidak menjerakan;
- d. dilatar belakangi oleh motivasi ekonomi, untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain, dengan cara memakai tenaga listrik sebanyak-banyaknya tetapi ingin membayar rekening listriknya dengan biaya yang rendah.

2. Proses Terjadinya Pencurian Tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum

Dari hasil wawancara dengan responden pertama yaitu petugas PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) secanggang, Bapak Arifin, diketahui bahwa daerah yang rawan akan pencurian tenaga listrik di Desa secanggang adalah Dusun Kehutanan, Dusun Hilir dalam dan Dusun Pekan. Hal ini dapat dimengerti mengingat jumlah Kepala Keluarga (KK) yang cukup banyak di daerah tersebut dengan tingkat ekonomi dan kesadaran hukum yang bermacam-macam.

Dari pelaku tindak pidana pencurian tenaga listrik terlihat bahwa para pelaku ada yang merupakan pelanggan dan ada yang bukan pelanggan. Mereka melakukan hal tersebut dengan:

- a. Sendiri, yaitu tidak dibantu oleh orang lain cara atau keterangan tentang pemakaian listrik secara tidak sah, tindakan yang sering dilakukan adalah mencantol dan merusak termis;
- b. Bantuan orang lain Adapun pelaku dari perbuatan itu adalah:
 - 1) Pelanggan (Konsumen);
 - 2) Bukan Pelanggan;
 - 3) Oknum PLN untuk kepentingan sendiri;

- 4) Oknum PLN yang memberi bantuan untuk melaksanakan sambungan liar.

Bantuan tersebut berupa.

- a) Bantuan tidak langsung, yaitu Pemberian keterangan tentang cara melakukan sambungan liar;
- b) Bantuan Langsung, yaitu Oknum PLN sendiri yang melakukan perbuatan sambungan liar tersebut.

c. Kealpaan

- 1) Dari Pelanggan (Konsumen), ia tidak mengetahui bahwa rumah yang baru ditempati tidak membayar rekening listrik sehingga harus menanggung akibatnya;
- 2) Dari petugas, terjadi karena kurangnya informasi tentang data pelanggan sehingga dapat menyiapkan target operasi kurang terarah, menyebabkan pelaksanaannya tidak maksimal.

Pelanggaran yang paling sering ditemui di Desa Secanggang ini adalah pelanggaran golongan B dan C dengan modus operasi sebagai berikut:

1. Pelanggaran oleh pelanggan (Konsumen), seperti pelanggaran alat pengukur arus dan pembatas serta pelanggaran penggunaan alat pengukur arus dan pembatas, yang dapat dilakukan dengan:

- a. Membuka tutup terminal *kilowatt-hour* (kWh) meter, kemudian membypass *kilowatt-hour* (kWh) meter, membuka klem tegangan, membalik fasa, menyambung langsung tanpa melalui APP atau memasukkan film ke dalam *kilowatt-hour* (kWh);
- b. Merubah setelan *kilowatt-hour* (kWh) meter, merubah register, mengganti roda gigi, membalik fasa untuk *kilowatt-hour* (kWh) meter 3 fasa;
- c. Dengan menghubungkan sigkat pembatas, menyetel atau mengganti pembatas dengan maksud memperbesar daya tersambung;
- d. Merusak body alat pembatas;
- e. Melepas klem alat tegangan pada terminal meter/kawat nol pada terminal blok OK;
- f. Mempengaruhi bekerjanya/putaran *kilowatt-hour* (kWh) meter;
- g. Menghambat putaran *kilowatt-hour* (kWh) meter dengan cara mengganjal piringan atau as piringan *kilowatt-hour* (kWh);
- h. As piringan diatur maksimum dan roda cacing diregangkan.
- i. Memutus aliran listrik untuk time switch, merusak saklar kontraktor time switch, merubah posisi pembagian atau membalik waktu.

2. Pelanggaran oleh bukan pelanggan, seperti:

- a. Penyambung Langsung Jaringan Tenaga Rendah (JTR),
Penyambung Langsung Tegangan Menengah (JTM), Penyambung
Langsung Tegangan Tinggi (JTT);
- b. Penyambungan langsung Saluran Masuk Pelayanan (SMP).

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan dapat dibagi dalam dua hal, yaitu:

1. Penggunaan watt listrik secara melebihi kapasitas yang diijinkan berdasarkan kontrak perjanjian dimana kelebihan atas kapasitas tersebut tidak termonitor didalam meteran sehingga pembayaran rekening tidaklah termasuk penggunaan watt yang kelebihan tersebut;
2. Pelanggan yang tidak melebihi kapasitas watt yang diijinkan sesuai kontrak perjanjian tetapi memperkecil penggunaan watt yang sesungguhnya dimanipulasi dengan hanya membayar jumlah watt yang ada pada meteran.

Sedangkan hasil yang diharapkan dari perbuatan yang dilakukan oleh bukan pelanggan adalah menikmati penggunaan atau pemakaian tenaga listrik secara Cuma-Cuma, tanpa membayar.

Operasi penertiban listrik (OPAL) atau yang sekarang disebut Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yaitu kegiatan yang berupaya mencari dan mengidentifikasi pencurian tenaga listrik yang terjadi melalui pemeriksaan langsung, yang dilakukan terhadap instalasi listrik pelanggan maupun bukan pelanggan.

Kegiatan Opal atau P2TL dilaksanakan berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan terhadap rekening konsumen yang bersangkutan atau berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, petugas pencatat meter atau sumber informasi lainnya.

Wawancara dengan responden kedua yaitu bapak pagong, beliau menuturkan.

beliau adalah mantan petugas PLN P2TL yang sudah dipecat, dulu beliau dipecat karena beliau menjalankan bisnis pencurian tenaga listrik, beliau adalah pihak yang memfasilitasinya, setiap rumah yang beliau razia banyak yang mengeluhkan melonjaknya kenaikan tagihan rekening listrik, padahal mereka telah menghemat daya listrik yang mereka gunakan setiap bulannya, akan tetapi setelah melakukan pembayaran setiap bulanya terus melonjak, jadi dengan banyaknya keluhan pelanggan seperti itu, saya mulailah dengan menjual alat penghemat daya listrik, atau pembatas listrik, rumah yang ingin

memasang alat penghemat listrik ini harus membayar alatnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan adanya alat ini, rumah tersebut tidak perlu melakukan pembayaran banyak, alat tersebut seperti alat pengatur batas daya, jadi ketika alat itu di aktifkan, alat itu bisa memberhentikan as piringan atau memperlambat as piringan meteran.

Wawancara dengan responden ketiga yaitu dengan buk juriah, beliau menuturkan:

Beliau adalah konsumen listrik pasca bayar, beliau dulunya adalah konsumen yang jujur, alasan beliau menggunakan alat pencurian listrik tersebut karena melonjaknya tagihan listrik setiap bulannya yang harus beliau bayar dan kadang tidak sesuai dengan pemakaian beliau, beliau sudah melakukan pencurian listrik sekitar 1 (satu) tahun dan tidak pernah di razia oleh pihak PLN. Pencurian tenaga listrik tersebut dilakukan karena beliau tidak mengetahui bahwa pencurian tersebut banyak konsumen lain yang dirugikan, ia berfikir hanya pihak PLN saja yang dirugikan.

B. Kerugian yang Ditanggung Konsumen Listrik di Desa Secanggang

Terkait Pencurian Tenaga Listrik Oleh Oknum

Listrik adalah sumber terpenting dalam kehidupan. Tanpa listrik, konsumen tidak dapat melakukan aktifitas. Jika diibaratkan, listrik sudah

seperti nafas hidup bagi konsumennya. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan menggunakan energi listrik. Mulai dari rumah tangga, perkantoran, fasilitas publik, dan masih banyak lagi. Banyaknya gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu besar penerang jalanan membuat listrik menjadi hal yang sangat penting, bisa dikatakan jika tidak ada listrik, konsumen akan kembali ke abad kuno, hanya dibekali terangnya matahari siang dan bulan di malam hari, tidak ada komunikasi yang bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan di jaman milenial ini, semua teknologi dan penunjang kehidupan membutuhkan listrik.

Namun dalam hal ini listrik nampaknya juga seperti pisau bermata dua, yang mana di satu sisi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, sedangkan di sisi yang lain listrik juga dapat memberikan kerugian bagi konsumen.

Salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh PT. PLN Desa Secanggang adalah kasus penggunaan tenaga listrik secara ilegal oleh sebagian masyarakat. Motif tindakan seperti inipun beragam dan tidak sepenuhnya karena dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh layanan listrik gratis.

Praktek ilegal ini sebenarnya tidak saja menjadi monopoli penghuni rumah liar. Tapi juga dilakukan oleh kalangan industri yang memanfaatkan kelengahan petugas PLN. Akibatnya, kerugian yang dihasilkan tidak saja bagi

PLN selaku produsen listrik tapi juga masyarakat yang tercatat sebagai pelanggan resmi (Konsumen).

Hal ini semakin didukung dengan kemudahan dalam “mengakali” aliran listrik yang digunakan. Bahkan bagi seseorang yang bukan sarjana teknik pun dapat dengan mudah melakukan kecurangan dengan mengambil aliran langsung dari tiang listrik. Hanya dengan berbekal kabel putih panjang dan tang, oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini melakukan kecurangan yang akhirnya mengakibatkan daya listrik yang seharusnya dibagi rata keseluruhan rumah menjadi berkurang, penyambungan ilegal dikawasan perumahan merupakan salah satu contoh bentuk perbuatan yang bisa mengakibatkan kematian, karena bisa saja akibat ulah oknum itu terjadi hubungan arus pendek sehingga berujung pada kebakaran dan yang paling parah kematian.

Selain mencuri listrik langsung dari tiang, modus kegiatan ilegal lain adalah mempengaruhi alat pembatas penggunaan listrik atau sekering, pencurian ini dengan mengganti batasan daya listrik ke yang lebih tinggi sehingga bisa menggunakan listrik dengan daya lebih besar tanpa izin resmi dari PLN dan mempengaruhi alat pembatas, pencurian listrik juga dilakukan dengan mempengaruhi meteran mencatat konsumsi listrik, dengan begitu dapat memperlambat pencatatan konsumsi listrik.

Konflik yang tidak kalah menarik di Desa Secanggang terkait pemakaian listrik ilegal lainnya adalah pencurian listrik milik tetangganya sendiri, ini terjadi di dusun kehutanan, dimana atas nama bapak baharudin mencuri listrik milik ibu kalsum dengan cara mencari instalasi listrik milik bu kalsum kemudian dipotong dan setelah itu kabel yang dibawahnya disambungkan ke instalasi milik ibu kalsum dan kemudian kabel tersebut ditutup menggunakan lakban, setelah itu kabel tersebut ditarik ke warungnya dan diteruskan ke stop kontak, setelah tersambung lampunya pun menyala, akibat perbuatan bapak baharudin tersebut pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik di bulan maret dan april sangat tinggi tidak seperti biasanya, ibu kalsum mengalami kerugian Rp 1. 270.205.- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima rupiah)

Ketika banyaknya masalah yang timbul dibidang kelistrikan, masyarakat menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dari berbagai masalah yang ada, sebenarnya inti pokok masalah persoalannya pada hak dan kewajiban kedua belah pihak, dalam hal ini, PT. PLN selaku produsen jasa kelistrikan dan masyarakat sebagai konsumen.

Ketika maraknya pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum, selain pihak PT. PLN sebagai produsen yang dirugikan, masyarakat sebagai konsumen juga sangat banyak dirugikan.

Dengan maraknya kasus pencurian tenaga listrik, menyebabkan jaringan PT. PLN *overload* sehingga memungkinkan PT. PLN memadamkan listrik secara sepihak tanpa pemberitahuan.

Dimensi hukum padamnya listrik jelas tidak mengembirakan bagi pelanggan/ konsumen listrik. Dalam perspektif perlindungan (hukum) terhadap konsumen, setidaknya dua hal mengemuka disini. Pertama, ditengah-tengah minimnya konsekuensi hukum padamnya listrik, PT. PLN terlampau egois menghitung kerugian ekonomisnya ketimbang kerugian ekonomis yang dialami berbagai lapisan pelanggan/konsumen. Evaluasi masalah-masalah teknis kelistrikan cenderung menyalahkan perusahaan pembuatan peralatan-peralatan PT. PLN. Tentu saja hal ini mengundang pertanyaan pasokan peralatan tersebut tidak memenuhi standar dan prosedur di PT. PLN, Hal-hal teknis demikian perlu kiranya transparansi kebijakan kepada masyarakat agar diketahui bagaimana mata rantai kegiatan penyediaan tenaga listrik secara berkeseimbangan.

Kedua, dimensi keadilan bagi pelanggan/konsumen untuk mendapatkan ganti rugi banyak dikorbankan, khususnya konsumen rumah tangga hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN hanyalah hiasan Undang-Undang ketenagalistrikan. Ketika konsumen menjumpai dalam masalah, konsumen dihadapkan pada berbagai pembatasan yang sah menurut

hukum. Tidak mudah menyingkap tabir pembatasan hukum demikian. Dibandingkan pelanggan listrik untuk kepentingan bisnis biasa, khusus bagi konsumen rumah tangga tidak mudah memformulasikan besarnya kerugian secara material akibat padamnya listrik, misalnya: terhambatnya kegiatan-kegiatan rumah tangga sehari-hari atau tidak berfungsinya perangkat elektronik rumah tangga karena padamnya listrik.

Tak bisa dipungkiri, pemadaman listrik mendatangkan kerugian besar bagi konsumen. Bahkan, keluhan masalah listrik masuk dalam daftar lima besar yang sering dilaporkan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan pemadaman listrik boleh PLN dinilai sering dilakukan dengan tidak adil. Pasalnya, sering sekali pemadaman listrik bersifat sepihak tanpa kompensasi apapun kepada pelanggan yang terkena dampak langsung.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik mengatur bahwa PT. PLN wajib memberikan tagihan listrik kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat tingkat mutu pelayanan yang tidak terpenuhi. Pengurangan itu akan diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya.

adapun indikator tingkat mutu pelayanan adalah lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan meter, dan waktu koreksi kesalahan rekening. Lebih lanjut, peraturan tingkat mutu pelayanan listrik diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN.

Pasal 5 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) itu mengatur besaran pengurangan tagihan listrik yang wajib diberikan oleh PLN kepada pelanggan yang menderita kerugian akibat gangguan listrik. Disebutkan bahwa, besaran yang harus dikurangi PT. PLN adalah 20% (dua puluh persen) dari biaya beban pelanggan. Namun, Pasal 7 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) mengatur penyebab pemadaman listrik yang membebaskan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dari kewajiban pemberian kompensasi. Secara limitatif disebutkan penyebab yang dimaksud adalah huru-hara, sabotase, dan bencana alam seperti banjir.

Kendati banjir dapat menjadi alasan pembenar bagi PT. PLN untuk melakukan pemadaman listrik, dalam hal ini, PT. PLN haruslah tetap melakukan pembenahan sistem. Pemadaman yang dilakukan PT. PLN lebih banyak akibat

masalah kelistrikan yang terjadi dari segi suplay yang harus dipenuhi akibatnya, diluar peristiwa banjir masyarakat tetap sering mengalami pemadaman listrik.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Perlindungan terhadap konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen,

Dengan hadirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 selain Fatwa ini bentuk pembelaan terhadap Perusahaan PT. PLN, Fatwa ini juga mengkhawatirkan konsumen karena selain PLN yang dirugikan, konsumen juga banyak dirugikan.

Masalah perlindungan konsumen di jamin oleh agama. Hak konsumen yang di cederai termasuk katagori jual beli yang bathil, sebagaimana tercantum dalam QS. An-nisa: 4/29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Bagimu”*.⁶⁴

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yakni dengan jalan yang bathil. Akan tetapi, memerintahkan untuk memperoleh sesuatu yaitu dengan jalan yang di ridhoi Allah SWT dengan yang berlaku suka sama suka.

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *dan janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu, di antara kamu dengan jalan yang bathil*, yakni tidak sesuai tuntutan syariat. *Tetapi* hendaklah kamu memperoleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 1990) h. 136

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (jakarta: Lentera Hati, 2002), h.497.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah[2]: 188)

”. (QS. al-Syu’ara [26]: 183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

(QS. al-Syu’ara [26]: 183)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: "...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah [2]: 279)

Jadi, dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, selain mendukung kinerja kerja PT. PLN, MUI juga memperhatikan konsumen dilihat dari Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 di Point ke 3, "Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan".

Pada dasarnya, tindakan penyalahgunaan atau kecurangan dalam bentuk bentuk apapun merupakan tindakan yang melanggar nilai agama, termasuk penyalahgunaan aliran listrik, dewasa ini, penyalahgunaan aliran listrik juga telah sampai pada tingkat yang meresahkan, merugikan, serta membahayakan masyarakat. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa dampak penyalahgunaan listrik, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada lingkungan, serta secara agama, materi, maupun sosial.

Hadirnya Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 20116 tentang Pencurian Arus Listrik merupakan wujud kepedulian Majelis Ulama Indonesia terhadap masyarakat, terkait maraknya penyalahgunaan listrik. Selain itu, fatwa ini juga dapat menjadi salah satu pendekatan dari sisi agama tentang kesadaran akan

pentingnya menggunakan listrik secara legal sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilaksanakan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen (Masyarakat) akibat pencurian tenaga listrik oleh oknum menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 studi di Desa Secanggang, Kecamatan, Secanggang, Kabupaten Langkat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen Menurut Fatwa Majelis Ulama Nomor 17 Tahun 2016 dan Hukum Positif adalah Pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan.
2. Adapun praktek pencurian yang dilakukan oleh oknum yaitu:
 - a. Mengganti Miniature Circuit (MCB) meteran listrik sehingga daya listrik yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya;
 - b. Dengan mengakali kWh meter (meteran listrik) dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 sehingga pemakaian listrik pemakaian listrik yang tercatat di meteran menjadi lebih sedikit dibanding pemakaian sebenarnya;

- c. Gabungan antara pelanggaran jenis pertama dan kedua, yaitu mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran;
- d. Dilakukan oleh pedagang kaki lima dan warung-warung pinggir jalan yaitu dengan membuat sambungan listrik dari penerangan jalan umum (PJU).

Dapat menimbulkan arus pendek listrik yang bisa mengakibatkan kebakaran serta merembet ke tempat sekitarnya.

3. Perlindungan konsumen listrik telah ada di Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 akan tetapi masih belum maksimal dikarenakan masih lemahnya pengawasan PT. PLN di desa secanggih untuk meminimalisir praktek-praktek pencurian oleh oknum pencurian tenaga listrik ditambah lagi dengan lemahnya sanksi terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dan banyaknya petugas-petugas yang turut serta membantu kelangsungan pencurian listrik tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah memberikan pengertian tentang hak-hak konsumen agar Masyarakat awam mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka sehingga mereka tidak selalu di curangi akibat perbuatan oknum-oknum tersebut.

2. Pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif dari pemakaian listrik secara ilegal, baik ekonomi maupun sosial
3. Aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik antara anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara ilegal, termasuk pihak yang memfasilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian baku dalam praktik perusahaan perdagangan*, (bandung: citra aditya bakri), 1992.
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz V*, (Jakarta : Sinar Baru Algensindo), 1996.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Brotosusilo, Agus, *Instrumen atau Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia), 1997.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; Gramedia), 1986.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an), 1990.
- Fatwa MUI No. 17 Tahun 2016, *Tentang pencurian arus listrik*
- Freidman, Lawrence M, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press), 1994
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Husaini Usman, et al, *Metode penelitian sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Koentjoningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, jakarta : PT... Gramedia, 1997
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mieker, Komar, *Cyber law*, Jakarta : PT... Raja Grafindo Persada, 2001
- Rahardjo, Yusuf, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni), 1986
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grafindo), 2004

- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Jakarta: Citra Adhya Bakti), 2003
- Soekanto, soedjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), 1986
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum perdata*, (Jakarta: Intermassa), 1987.
- Sudaryatno, *Masalah perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1996
- Suherman, E, *Masalah Tanggung Jawab dan Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan*, (Bandung: Alumni), 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metode resech*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM), 1990
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju, 2000
- Usman, Rahmadi, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: Gramedia), 2002
- Wirapradja, E, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Internasional*, (Yogyakarta: Liberty), 1986
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013